

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Evaluasi.

Evaluasi merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris, “*evaluation*”. Menurut pengertian umum program dapat diartikan sebagai “rencana” dikarenakan program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan (Arikunto dan Cipi, 2014).

Pemahaman mengenai evaluasi dapat menjadi berbeda-beda sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli. Menurut (Tague-Sutcliffe dalam Rinaldi, 2015) mendefinisikan evaluasi sebagai *a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils*. Evaluasi tidak hanya menilai suatu aktifitas secara spontan tetapi juga menilai secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut (Dunn dalam Rianda, 2015) evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi program adalah langkah awal dari supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Orang yang melakukan evaluasi disebut *evaluator*. Tujuan dari evaluasi

program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program, karena *evaluator* program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya serta menentukan tidak lanjut dari program tersebut (Arikunto dan Cepi, 2014; Kurnia, 2010).

a. Model-Model Evaluasi.

Menurut Sukardi (2015) dalam evaluasi program ada beberapa model evaluasi yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi. Adapun model-model tersebut adalah:

- 1.) Model Tyler merupakan model yang menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan pada tujuan instruksional.
- 2.) Model bebas tujuan merupakan model yang mengharuskan *evaluator* tidak perlu mengetahui tujuan dari objek yang dievaluasi.
- 3.) Model *Context Input Process Product* (CIPP) merupakan model yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan alternatif dan penindak lanjutan konsekuensi dari suatu keputusan.
- 4.) Model *countenance* merupakan model yang menekankan pada dua standar yaitu standar absolut dan standar relatif.
- 5.) Model *sumatif* (dilakukan saat program masih berlangsung untuk mengetahui sejauh mana program telah berlangsung) dan formatif (dilakukan setelah program berakhir dengan tujuan mengukur ketercapaian program).

6.) Model *connoisseurship* atau model ahli merupakan model yang menggambarkan penyimpangan dari metodologi yang telah dieksploitasi oleh para praktisi evaluasi.

b. *Evaluator* Dalam dan Luar.

*Evaluator* yang akan melaksanakan evaluasi program bisa dari dua sumber yaitu *evaluator* luar dan *evaluator* dalam. Setiap sumber *evaluator* pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dalam tabel ini akan diuraikan tentang kelebihan dan kekurangan setiap *evaluator*.

**TABEL 2.1.**  
Kelebihan Dan Kekurangan *Evaluator*

No	<i>Evaluator</i> Dalam	<i>Evaluator</i> Luar
1.	Sangat mengetahui seluk beluk program	Sukar mengetahui seluk beluk program
2.	Mudah mendapatkan data	Sukar mendapatkan data
3.	Sering kali tidak obyektif	Obyektif karena tidak berkepentingan
4.	Dapat memberi informasi penting yang kontekstual	Tidak dapat memberi informasi penting yang kontekstual

Sumber: Roswati dalam (Munthe, 2015)

c. *Monitoring* Dan Evaluasi (Monev).

1.) Pengertian Monev.

Menurut Suharto (2010) *monitoring* adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan

terhadap suatu program yang telah selesai atau minimal telah berjalan selama tiga bulan.

Nalahudin (2010) mendefinisikan *monitoring* adalah suatu proses untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan program yang telah dilaksanakan. Sementara itu evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas program, pencapaian program serta dampak dari program yang telah dilakukan. Hal itu diketahui dari informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

*Monitoring* menyelesaikan permasalahan menggunakan data dasar yang tersedia, sedangkan evaluasi dapat dilakukan setelah memperoleh hasil dari *monitoring* yang kemudian akan di bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Oleh sebab itu antara evaluasi dan *monitoring* tidak boleh dipisahkan (Widiarto, 2012).

## 2.) Tujuan Monev.

Tujuan monev menurut Suharto adalah untuk mengetahui apakah program yang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengetahui saran yang baik untuk digunakan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana program sudah tercapai dan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilakukan (Suharto, 2010).

### 3.) Sasaran Monev.

Mengetahui apa saja yang menjadi sasaran monev merupakan hal yang paling penting dalam melakukan monev. Menurut (Own dan Rogers dalam Suharto, 2010) terdapat 5 sasaran monev yaitu sebagai berikut:

- a.) Program, untuk mencapai perubahan diperlukan kegiatan atau aktivitas yang dikenal dengan kata program.
- b.) Kebijakan, sesuatu yang telah tetap berisi prinsip-prinsip dan digunakan untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan.
- c.) Organisasi, wadah yang menjadi tempat perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan baru.
- d.) Produk atau hasil, hasil yang diperoleh dari kegiatan/program tertentu bisa baik bisa buruk.
- e.) Individu, orang atau manusia yang berada didalam suatu wadah yang disebut organisasi.

### 4.) Sistem Monev.

Keberagaman sistem *monitoring* dan evaluasi menjadikan masing-masing pendekatan memiliki indikator yang bersifat subsistem, indikator tersebut menurut (Suhato, 2010) yaitu:

- a.) Masukan (*input*), hal yang diperlukan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi agar menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan.

- b.) Proses (*process*), kegiatan pengolahan setelah adanya *input* dan sebelum menjadi hasil/*output*.
- c.) Keluaran (*output*), hal yang diperoleh setelah dilakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi baik fisik maupun nonfisik.
- d.) Hasil (*outcome*), hasil yang telah memberi kesan bahwa hasil yang diperoleh telah berhasil/berfungsi.
- e.) Dampak (*impact*), hal yang ditimbulkan atau menjadi akibat dari tiap indikator baik yang bersifat positif ataupun negatif.

#### 5.) Proses Monev.

Kegiatan monev akan berlangsung dengan teratur apabila dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Adapun langkah melakukan *monitoring* dan evaluasi menyesuaikan keadaan yang ada. Terdapat 10 langkah yang dapat menjadi patokan menjalankan *monitoring* dan evaluasi menurut Suharto (2010) yaitu:

- a.) Menentukan ruang lingkup hal yang akan dievaluasi, apakah program yang akan dievaluasi hanya ada satu atau ada beberapa program yang saling berkaitan yang akan dievaluasi.
- b.) Menguraikan latar belakang dan sejarah program yang akan dievaluasi secara singkat.
- c.) Menggali sumber informasi baik primer maupun sekunder.
- d.) Menetapkan tujuan *monitoring* dan evaluasi (monev).
- e.) Membuat pertanyaan-pertanyaan.
- f.) Menetapkan teknik yang akan digunakan.

- g.) Tetapkan peranan tim pelaksana *monitoring* dan evaluasi.
- h.) Mengkaji jadwal dan prosedur monev.
- i.) Menguraikan sumber dana akan diarahkan ke mana dan untuk apa saja.
- j.) Mengumpulkan data dan menyiapkan pelaporan. Setelah semua telah dipersiapkan maka monev dapat dilakukan.

Evaluasi pemberdayaan merupakan satu konsep, teknik, temuan yang digunakan untuk mendorong terhadap perbaikan dan penentuan tentang nasib diri sendiri (Kasmel and Pernille, 2011).

## **2. Pemberdayaan.**

### **a. Pengertian Pemberdayaan.**

Secara Bahasa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Secara istilah pemberdayaan merupakan proses mendapatkan kemampuan atau kekuatan. Proses yang dimaksud tertuju pada tindakan untuk mengubah masyarakat yang lemah, baik *knowlodge*, *attitude* maupun *practice* (KAP) menuju penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Suparjana dan Hempri dalam Hidayah, 2013).

Pada dasarnya pemberdayaan dianggap sebagai proses yang harus dilalui oleh pihak yang menginginkan perubahan dalam dirinya baik dari sisi kapasitas maupun kapabilitas untuk menjadi sumber daya yang dapat membantu dirinya menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat juga dapat disebut sebagai cara untuk menjadikan masyarakat ikut berperan dalam kegiatan pembangunan (Rubiyanah dkk., 2016).

Pemberdayaan masyarakat menurut (K. Suhendra dalam Internawati, 2013) adalah gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang pada mulanya menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli seperti Ife, Swith dan Levin, Rappaport, Parson maka (Suharto dalam Mulyadi, 2012) menyimpulkan definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud adalah:

- 1.) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) tidak hanya bebas berpendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
- 2.) Mampu meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang diperlukan.
- 3.) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

b. Tujuan Pemberdayaan.

Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang mandiri maksudnya masyarakat telah mampu memecahkan permasalahan dengan menggunakan kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif dan sumber daya lainnya. Terjadinya keberdayaan pada aspek-aspek tersebut dapat memberikan



kontribusi pada terciptanya masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat mandiri dan dapat mewujudkan komunitas yang ideal sesuai dengan harapan dari pemberdayaan (Teguh dalam Hidayah, 2013).

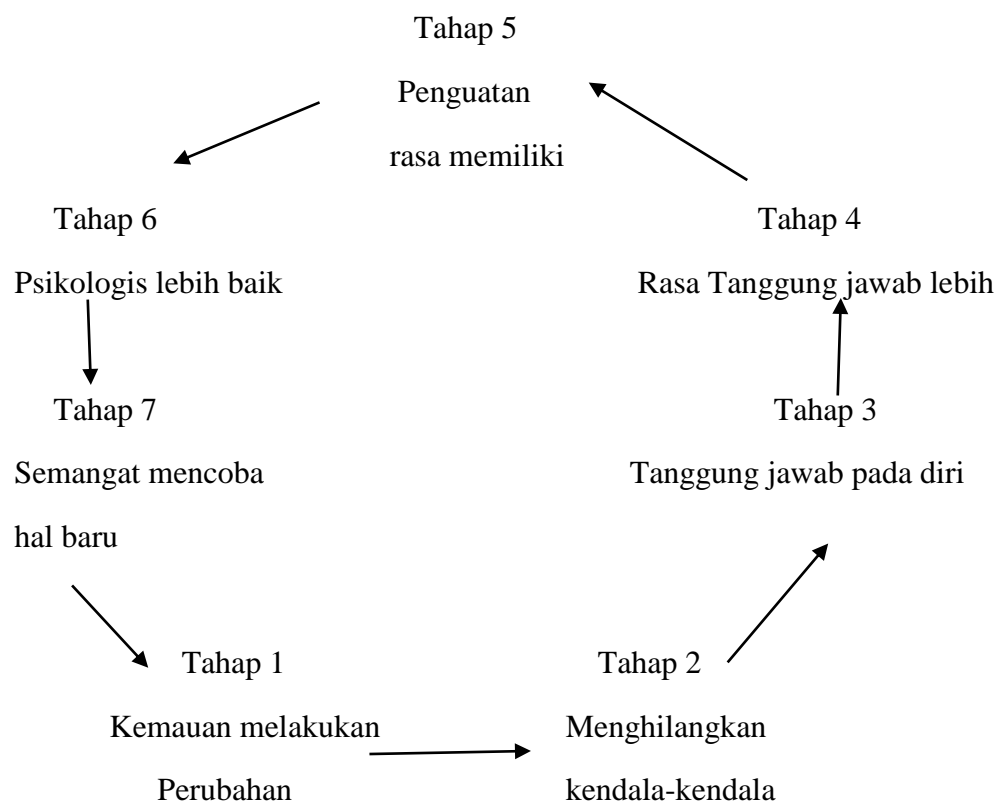
Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat hal yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses permintaan (Anwar dalam Izzaqiyah, 2014).

c. Tahapan Pemberdayaan.

Menurut (Wilson dalam Mubarak Zaki, 2010) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Adapun tahapan pemberdayaan tersebut yaitu:

- 1.) Kemauan dari dalam diri masyarakat untuk melakukan perubahan yang positif.
- 2.) Masyarakat diharapkan mampu menghilangkan penghambat kemajuan dirinya dan komunitasnya untuk menjadi lebih maju.
- 3.) Masyarakat telah menerima kebebasan tambahan dan mampu bertanggung jawab untuk mengembangkan diri sendiri dan komunitas.
- 4.) Usaha pengembangan peran dan tanggung jawab yang semakin luas seperti peningkatan pada minat dan motivasi melakukan pekerjaan.
- 5.) Hasil pemberdayaan mulai tampak dan terjadi peningkatan kinerja dengan memperkuat rasa saling memiliki,

- 6.) Terjadi perubahan perilaku dan kesan pada dirinya seperti peningkatan psikologis lebih baik dari kondisi sebelumnya akibat dari peningkatan kinerja yang terjadi
- 7.) Keberhasilan masyarakat dalam memberdayakan diri sendiri dan berkeinginan kuat untuk mencoba hal-hal yang lebih maju.



Sumber: Wilson dalam Mubarak Zaki (2010)

**Gambar 2.1.**  
Siklus Pemberdayaan Masyarakat

d. Konsep Pemberdayaan.

Menurut (Sumodiningrat dalam Izzaqiyah, 2014) konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1.) Perekonomian rakyat diselenggarakan oleh rakyat dengan potensi rakyat untuk menjalankan roda perekonomian.
- 2.) Pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki kendala struktural, sehingga diperlukan perubahan struktural.
- 3.) Perubahan struktural maksudnya perubahan dari ekonomi tradisional menjadi modern. Langkah yang ditempuh dengan pengalokasian sumber daya, pemasaran teknologi, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia.
- 4.) Pemberdayaan ekonomi rakyat juga harus dijamin dengan kerja sama yang erat antara yang telah maju dan baru berkembang.
- 5.) Kebijakan dalam pemberdayaan seperti peluang mengakses aset produksi, memperkuat kemitraan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong wirausaha dan pemerataan spasial.
- 6.) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha dan peningkatan akses sarana prasarana yang mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal.

e. Model Pemberdayaan Umat.

Salah satu model pemberdayaan umat adalah model navigasi 12S-7C5P-3S-GT, model navigasi ini terdiri dari unsur 12S, 7C, 5P, 3S dan GT. Adapun yang dimaksud dengan 12 *spirit* (12S) yang artinya adalah: *spirit* yang menjadi keyakinan/kekuatan intrinsik (*power within*) dalam melakukan upaya pemberdayaan umat. 7 *credo* (7C), yaitu: 7 pengakuan

kepercayaan dan komitmen diri yang merupakan penjabaran dari 12 *spirit* dalam pemberdayaan umat, 5 perilaku (5P) yang menjadi etos kerja normatif dan produktif (5 kartu AS) dalam pemberdayaan umat, 3 strategi (3S) dalam pemberdayaan umat. Ketiga strategi tersebut (3S) adalah: strategi sosio-karitatif, strategi sosio-ekonomis dan strategi sosio-transformis. Garam dan Terang dunia (GT), yaitu ormas keagamaan seyogianya mampu melakukan reposisi dan refungsionalisasi sebagai garam dunia yang memberikan cita rasa bagi kehambaran dunia, dan memberikan suluh dalam menerangi kegelapan kemiskinan di mana ormas keagamaan berada (Sutisna, 2013).

f. Pemberdayaan Sosial-Ekonomi.

Pemberdayaan sosial-ekonomi merupakan usaha memberi pengetahuan keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri pada masyarakat agar tercipta swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi. Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja (yayasan SPES dan Tjokroamidjojo dalam Izzaqiyah, 2014).

### 3. Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (ormas) pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Sejalan dengan undang-undang (Wiese dan Becker dalam Sutowo dan Susilo, 2013) berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Selain itu dalam Undang-Undang (UU) tentang organisasi kemasyarakatan dijelaskan bahwa ormas memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi dan keberadaan masyarakat serta mewujudkan tujuan negara. Ormas juga memiliki fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat dan pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan tujuan dan fungsi ormas menurut UU tersebut semakin mempertegas bahwa ormas menjadi sangat penting untuk mempermudah kerja pemerintah dalam pencapaian tujuan negara. Ormas dapat menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam berbagai hal terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif politik ormas merupakan kelompok kepentingan menjadi bersifat politik apabila melakukan tuntutan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Individu juga dapat menjadi penting secara politik apabila dapat menjadi bagian dari suatu kelompok kepentingan. Oleh sebab itu kelompok ini menjadi jembatan penting antara individu dan pemerintah (Kusumanegara, 2010).

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna di setiap proses pembangunan. Oleh sebab itu, ormas yang berkembang di berbagai bentuk masyarakat Indonesia yang majemuk perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan yang mengekang kegiatan mereka, justru menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan potensi yang ada di dalam ormas. Pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ormas yang mendukung kebijakan pemerintah (Mulyadi, 2012; Widiartati, 2010).

Peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah yang mandiri serta berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Ormas juga mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi kepada masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Mulyadi, 2012).

#### **4. Teori Kemiskinan.**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Rubiyana dkk., 2016) Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah kebutuhan dasar minimum yang diartikan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang

disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti: pakaian, perumahan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya) atau yang biasa disebut garis kemiskinan.

Menurut (kang Moeslim dalam Burhani, 2016) definisi orang miskin itu tidak dibatasi hanya pada orang yang miskin secara ekonomi saja. Orang miskin adalah mereka yang mengalami marjinalisasi sosial, seperti petani, pemulung, dan pelacur. Seseorang juga dikatakan miskin apabila mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas (Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya).

Sunoto dalam Windia (2015) mencatat bahwa kemiskinan secara konvensional merupakan kelompok yang memiliki pendapatan (*income*) dibawah garis kemiskinan, sehingga pengentasan kemiskinan hanya dari sisi ekonomi saja. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang yang memiliki pendapatan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
- b. Kemiskinan *relative*, yaitu seseorang yang pendapatannya di atas garis kemiskinan tetapi pendapatannya masih jauh di bawah orang di sekelilingnya.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu seseorang yang tidak berkemauan untuk memperbaiki kehidupannya walaupun telah ada orang lain yang menolongnya.

Ada beberapa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu: pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal dan tidak terpenuhinya standar gizi minimal (Rejekiningsih, 2011).

Terdapat beberapa teori yang dapat mempermudah dalam memahami tentang kemiskinan menurut (Nurmayanti dalam Windia, 2015) yaitu:

a. Teori Neoliberal.

Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave berpendapat bahwa kemiskinan adalah permasalahan seseorang yang terjadi karena kelemahan orang tersebut dalam menentukan pilihan, dan apabila kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan maka kemiskinan dapat diatasi.

b. Teori Sosial Demokrat.

Berdasarkan teori ini kemiskinan dianggap sebagai suatu permasalahan struktural yang terjadi karena ketidakmerataan masyarakat dalam mengakses pelayanan sosial dasar yang diberikan oleh negara sehingga terjadi ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Teori Marjinal.

Berdasarkan teori ini kemiskinan di kota terjadi karena kebudayaan kemiskinan yang telah melekat di kalangan mereka. Terdapat dua pendekatan dalam teori ini yaitu prakarsa diharuskan berasal dari luar kelompok dan perencanaan diharuskan berpusat terhadap perubahan nilai yang menjadi akar permasalahan.



d. Teori *Development*.

Teori ini berasal dari teori-teori pembangunan sebelumnya terutama teori neo liberal. Dalam teori ini ekonomi masyarakat menjadi tolak ukur dalam permasalahan kemiskinan karena ekonomi dipandang sebagai suatu kesatuan dengan kemiskinan seseorang.

e. Teori Struktural.

Menurut teori ini kemiskinan merupakan permasalahan politik-ekonomi dunia bukannya permasalahan yang mengarah pada budaya dan pembangunan ekonomi.

f. Teori Artikulasi Moda Produksi.

Pada teori ini reproduksi kapitalisme di negara miskin terjadi dua artikulasi modal produksi yaitu moda produksi pra-kapitalis dan moda produksi kapitalis. Selain itu pula terdapat dua pendekatan yang melandasinya: pertama, moderat yaitu dengan memberikan bantuan baik dari sisi bantuan sosial, jaminan sosial dan lainnya dan kedua, radikal yaitu perubahan/ transformasi karena di kehidupan masyarakat terjadi ketimpangan

## **5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan.**

Menurut Sa'yidah dan Arianti (2012) salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan menjadikan masyarakat miskin sebagai subjek untuk menentukan nasibnya sendiri atau

dengan kata lain konsep utamanya adalah memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber daya. Selanjutnya pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat lainnya dapat berperan sebagai fasilitator, regulator, pendamping dan stimulator sehingga mereka mampu berkembang.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban yang sesuai dengan tujuan nasional yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Lestari, 2015).

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) (Kristanto, 2010).

Berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 15 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

## **6. Pembangunan.**

Pembangunan adalah sesuatu yang positif yang berkaitan dengan perubahan atau perbaikan (Bellu, 2011). Pembangunan diartikan sebagai upaya dalam melakukan perubahan kehidupan masyarakat yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astroulakis, 2013).

Pembangunan sebagaimana dipahami (Katz dalam Suryono, 2010) merupakan perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan terhadap keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Sejalan dengan Katz, (Tjokoroamidjojo dalam Suryono 2010) mengartikan pembangunan yaitu suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.

Konsep pembangunan ini mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan tersebut memerlukan perjalanan panjang untuk sampai pada kelompok penduduk miskin (Darta, 2012).

Hudiyanto (2014) mengelompokkan teori pembangunan ke dalam dua kelompok yaitu teori modernisasi dan teori struktural. Pada teori modernisasi dibahas teori David Ricardo tentang peranan penduduk dan tingkat upah, teori pasokan tenaga kerja yang melimpah dari Arthur Lewis, teori tahap-tahap pertumbuhan dari Rostow, teori peran tabungan dari Harodd-Domar, teori Leibenstein tentang dorongan besar, teori usaha besar dan teori usaha minimum. Sementara itu pada teori struktural membahas tentang teori ketergantungan dari Raul Prebish.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi dalam kamus pembangunan termasuk paradigma pembangunan *inklusif*. Pembangunan *inklusif* menurut Prasetyantoko adalah pembangunan yang diperuntukkan untuk semua orang tidak peduli latar belakang, agama, suku dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan kata lain sebagai proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan (Tambunan, 2016).

## **7. Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan.**

### **a. Pengetahuan.**

Pengetahuan merupakan suatu hal yang menjadi hasil dari seseorang yang telah melakukan penginderaan pada suatu obyek tertentu. Pada penginderaan dapat terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal dan informal. Sehingga dengan pengetahuan tersebut tindakan atau perilaku seseorang dapat terbentuk. (Mastini, 2013; Utari, 2010).

Menurut (Bloom dalam Notoatmodjo, 2012) pengetahuan dibagi dalam enam tingkatan yaitu:

#### **1.) Tahu (*know*).**

Tingkat seseorang memanggil kembali memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2.) Memahami (*comprehension*).

Pada tingkat ini seseorang tidak hanya mengetahui tapi dapat menginterpretasikan dengan benar obyek yang dimaksud.

3.) Aplikasi (*application*).

Tingkatan seseorang telah mampu menerapkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4.) Analisis (*analysis*).

Tingkatan di mana seseorang telah bisa menelaah masalah baik dengan cara dijabarkan, dipisah maupun mencari hubungan antar komponen masalah.

5.) Sintesis (*synthesis*).

Tingkatan seseorang telah mampu merangkum komponen-komponen yang ada pada pengetahuan yang dimiliki.

6.) Evaluasi (*evaluation*).

Tingkatan terakhir seseorang telah bisa menilai sesuatu berdasarkan kriteria pribadi atau sesuai norma yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan menurut (Rogers dalam Notoatmodjo, 2012) bahwa dalam pengetahuan terdapat 5 proses berurutan yaitu:

- 1.) Kesadaran (*awareness*), seseorang telah mengetahui terlebih dahulu obyek tersebut.
- 2.) *Interest*, seseorang mulai tertarik pada *stimulus*.
- 3.) *Evaluation*, seseorang mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan *stimulus* bagi dirinya

- 4.) *Trial*, seseorang telah mencoba perilaku yang baru.
  - 5.) *Adoption*, seseorang telah bersikap sesuai dengan pengetahuan sikap terhadap *stimulus*.
- b. Sikap (*attitude*).

Sikap adalah suatu pendapat, keyakinan seseorang mengenai hal yang memberikan seseorang melakukan tindakan sesuai dengan pendapat dan keyakinannya atau juga sebagai respon dari suka tidaknya terhadap objek yang dirasakannya (Islamiyati, 2015).

Sikap adalah suatu hal yang tidak dibawa oleh seseorang dari lahir melainkan akan terbentuk sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Peranan *attitude* sangat penting dalam kehidupan yang akan menentukan seseorang dalam menentukan tindakan terhadap obyek (Gerungan dalam Purwoko, 2011).

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga terdiri dari beberapa tingkatan menurut Notoatmodjo (2012) yaitu:

- 1.) Menerima (*receiving*).

Menerima dapat diartikan bahwa seseorang atau subjek memiliki kemauan untuk memperhatikan rangsangan yang diberikan (objek).

- 2.) Menanggapi (*responding*).

Menanggapi diartikan bahwa subjek atau seseorang memberi balasan atau tanggapan terhadap pernyataan atau objek yang dihadapi.

3.) Menghargai (*valuing*).

Menghargai diartikan bahwa subjek atau seseorang memberikan nilai yang positif terhadap objek serta mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk merespons.

4.) Bertanggung jawab (*responsible*).

Tanggung jawab merupakan tahapan paling akhir dan juga menjadi sikap yang paling tinggi dalam melakukan suatu tindakan.

c. Keterampilan.

Keterampilan adalah perilaku yang terkait dengan tugas yang dapat dikuasai melalui pembelajaran dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan serta bantuan dari orang lain. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Keterampilan bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku (Sudarmanto dalam Nisak 2015)

Menurut (Robbins dalam Firza, 2014) pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1.) *Basic literacy skill*.

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti: membaca, menulis dan mendengar.

2.) *Technical skill*.

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat dan mengoperasikan komputer.

3.) *Interpersonal skill.*

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.

4.) *Problem solving.*

Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan logika, berpendapat dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Rohadi Joshua Sutisna (2013) melakukan penelitian dengan judul “Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mutu layanan/jasa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dalam penanggulangan kemiskinan umat dan menemukan model pemberdayaan yang seyogianya dilakukan GPIB untuk menanggulangi masalah kemiskinan, baik umat maupun masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis *explorasi*. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Uji beda (uji *U Mann Whitney*). Hasil dari penelitian ini adalah Mutu jasa yang GPIB Jemaat “Ekklesia” dan GPIB Jemaat “Nehemia” yang dilakukan untuk umat dan masyarakat tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan model pemberdayaan mengacu pada model Navigasi:12S-7C5P-3S-GT” di mana 12S adalah 12 *Spirit*,



7C adalah 7Credo, 5P adalah 5 Perilaku, 3S adalah 3 Strategi, dan GT adalah Garam dan Terang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada analisa data. Pada penelitian ini menggunakan analisa data Uji beda, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan analisa data deskriptif kuantitatif dan deskripsi kualitatif.

Fariz Husein (2013) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tahap perencanaan terhadap kinerja fasilitator, pelaksanaan terhadap kinerja fasilitator, perencanaan terhadap efektivitas pada PNPM mandiri pedesaan Bondowoso. Penelitian ini berjenis penelitian *explanatory* dan metode *descriptive*. Teknik analisa data yang digunakan adalah Uji Asumsi *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini adalah tahap perencanaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja fasilitator, tahap pelaksanaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja fasilitator, tahap perencanaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas PNPM-MP, tahap pelaksanaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas PNPM-MP dan kinerja fasilitator berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas PNPM-MP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada analisa data. Pada penelitian ini menggunakan analisa data SEM, sedangkan pada penelitian yang akan digunakan menggunakan analisa data deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

Isnan Murdiansyah (2014) yang melakukan penelitian tentang “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan program Gerdu-Taskin dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Malang, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program Gerdu-Taskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *exploratif* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Peran Program Gerdu-Taskin melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) berperan efektif dan penting dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian usaha masyarakat, meningkatkan pengembangan kelembagaan desa khususnya di daerah penelitian di wilayah selatan Kabupaten Malang. Beberapa keunggulan dalam Program Gerdu-Taskin yang dijalankan oleh UPK di daerah penelitian di Kabupaten Malang ialah mudahnya akses permodalan, pihak manajemen pengurus yang kompeten, berdedikasi dan berkomitmen serta partisipasi dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya masyarakat sekitar. Pada pelaksanaannya program ini masih mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: belum mempunyai badan hukum yang jelas dan tetap, belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) proses peminjaman dana simpan pinjam, dan lemahnya *political will* pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada jenis penelitian dan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *exploratif* dan analisa data hanya deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan

digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta analisa data deskriptif kuantitatif dan deskripsi kualitatif.

Yenni Kurnia (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus proyek kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada program pengembangan wilayah atau *Area Development Program* (ADP) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur)”. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi warga bervariasi namun secara umum dapat dikatakan memiliki nilai yang tinggi karena faktor pendamping, fasilitas memadai, *monitoring* dari pengurus dan keterlibatan semua pihak. Kedua *output* program ADP dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara wahana visi Indonesia dengan institusi kesehatan dalam menyediakan pelayanan gratis dan hal lainnya. Dampak pada kesehatan yaitu menurunnya kasus penyakit seperti saluran pernapasan, diare dan kulit. Dampak bagi pendidikan adalah meningkatnya prestasi belajar anak di sekolah. Perbedaan dengan penelitian yang ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus masalah. Pada penelitian ini fokus masalah untuk proyek kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada program pengembangan wilayah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus masalah pada pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota dampingan MPM PP Muhammadiyah.

Qianjin TAN, Weimin GOU, Peili SUN (2015) melakukan penelitian yang berjudul “*The Research on the Construction of Monitoring and Evaluation System for the Operation of Marine Economy in Liaoning Province*”. Tujuan

penelitian ini adalah mengusulkan konsep kelautan *monitoring* operasi ekonomi dan sistem evaluasi, memperkenalkan konten sistem konstruksi dan arsitektur, dan membahas isu-isu kunci pada sistem *monitoring* indeks, sistem evaluasi indeks, sistem konstruksi serta mekanisme pelaksanaan. Metode penelitian menggunakan analisis regresi dengan data *time series* yaitu analisis *cluster*. Hasil penelitian Pembangunan *monitoring* operasi dan sistem evaluasi untuk ekonomi kelautan di provinsi Liaoning tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi kelautan di provinsi Liaoning saja, tetapi juga membutuhkan lebih dari operasi pemantauan dan kemampuan evaluasi konstruksi di Cina, sehingga terjadi kesesuaian dengan yang diharapkan. Sistem konstruksi membantu untuk memahami informasi yang komprehensif tentang ekonomi laut dan situasi aktual operasi ekonomi kelautan serta memastikan pelaksanaan kontrol provinsi secara makro ekonomi. Pada saat yang sama, studi *monitoring* operasi dan sistem evaluasi untuk ekonomi kelautan adalah dapat memberikan keputusan ilmiah untuk membuat dasar sarana operasional yang efektif dan juga sebagai metode untuk manajemen operasi ekonomi kelautan di provinsi Liaoning masa depan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada analisa data. Pada penelitian ini menggunakan analisis *cluster* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Maria L. Gallo dan Louise Duffy (2016) melakukan penelitian yang berjudul “*The Rural Giving Difference? Volunteering as Philanthropy in an Irish Community Organization*”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk

mengesplorasi filantropi di pedesaan Irlandia dalam berkontribusi untuk membangun keberlanjutan dan keamanan finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur, kelompok fokus dan dokumentasi serta mengambil *sample* dengan *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis uji beda. Hasil penelitian yaitu Athletica-Og menunjukkan ketahanan dan kreativitas dalam filantropi mereka praktek menunjukkan waktu, bakat dan harta meskipun pasukan menantang bermain di masyarakat pedesaan. Pengaturan pedesaan ini dijadikan sebagai tempat untuk menawarkan kegiatan olahraga masyarakat dan untuk memperluas praktek filantropi mereka, Athletica-Og berfokus pada membangun komitmen relawan dan pada hubungan mereka di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada analisa data. Pada penelitian ini menggunakan analisis uji beda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis merangkum penelitian terdahulu dalam sebuah tabel.

**TABEL 2.2.**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Rohadi Jushua Sutisna/Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan.	Jenis penelitian: Deskriptif dan <i>Explorasi</i> . Analisa data: Uji beda (uji <i>U Mann Whitney</i> ).	Mutu jasa yang GPIB Jemaat “Ekklesia” dan GPIB Jemaat “Nehemia” yang dilakukan untuk umat dan masyarakat tidak terdapat perbedaan signifikan dan model pemberdayaan: Navigasi:12S-7C5P- 3S-GT”.	Analisa data
2.	Fariz Husein/ Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat.	Jenis penelitian: Deskriptif dan <i>Explorasi</i> . Analisa data: Uji Asumsi <i>Structural Equation Modelling (SEM)</i>	Tahap perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja fasilitator, tahap perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas PNPM-MP, dan kinerja fasilitator berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas PNPM-MP.	Analisa data

Lanjutan Tabel 2.2.

3.	Isnan Murdiansyah/ Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.	Jenis penelitian: <i>Exploratif</i> . Analisa data: Deskriptif Kualitatif.	Program Gerdu- Taskin melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) berperan efektif dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian usaha masyarakat, kelemahan dari program ini adalah belum mempunyai badan hukum yang jelas.	Analisa data
4.	Yenni Kurnia/ Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Proyek Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi pada ADP Jakarta Timur).	Jenis penelitian; kualitatif. Analisa data: Kuantitatif dan Kualitatif.	Tingkat partisipasi warga tinggi <i>output</i> program ADP dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara Wahana Visi Indonesia dengan institusi kesehatan. Partisipasi berakibat pada menurunnya kasus penyakit dan meningkatnya pendidikan sekolah.	Fokus masalah

Lanjutan Tabel 2.2.

5	Qianjin TAN, Weimin GOU, Peili SUN / <i>The Research on the Construction of Monitoring and Evaluation System for the Operation of Marine Economy in Liaoning Province.</i>	Analisa data: Analisis <i>cluster</i>	Pembangunan <i>monitoring</i> operasi dan sistem evaluasi untuk ekonomi kelautan di Provinsi Liaoning tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi kelautan di Provinsi Liaoning saja, tetapi juga membutuhkan lebih dari operasi pemantauan konstruksi di Cina.	Analisa Data
6	Maria L. Gallo dan Louise Duffy / <i>The Rural Giving Difference? Volunteering as Philanthropy in an Irish Community Organization.</i>	Jenis penelitian adalah kualitatif Analisa data: Uji beda	Athletica-Og menunjukkan ketahanan dan kreativitas dalam filantropi yang menunjukkan bakat meskipun menantang bermain dengan masyarakat pedesaan	Analisa Data

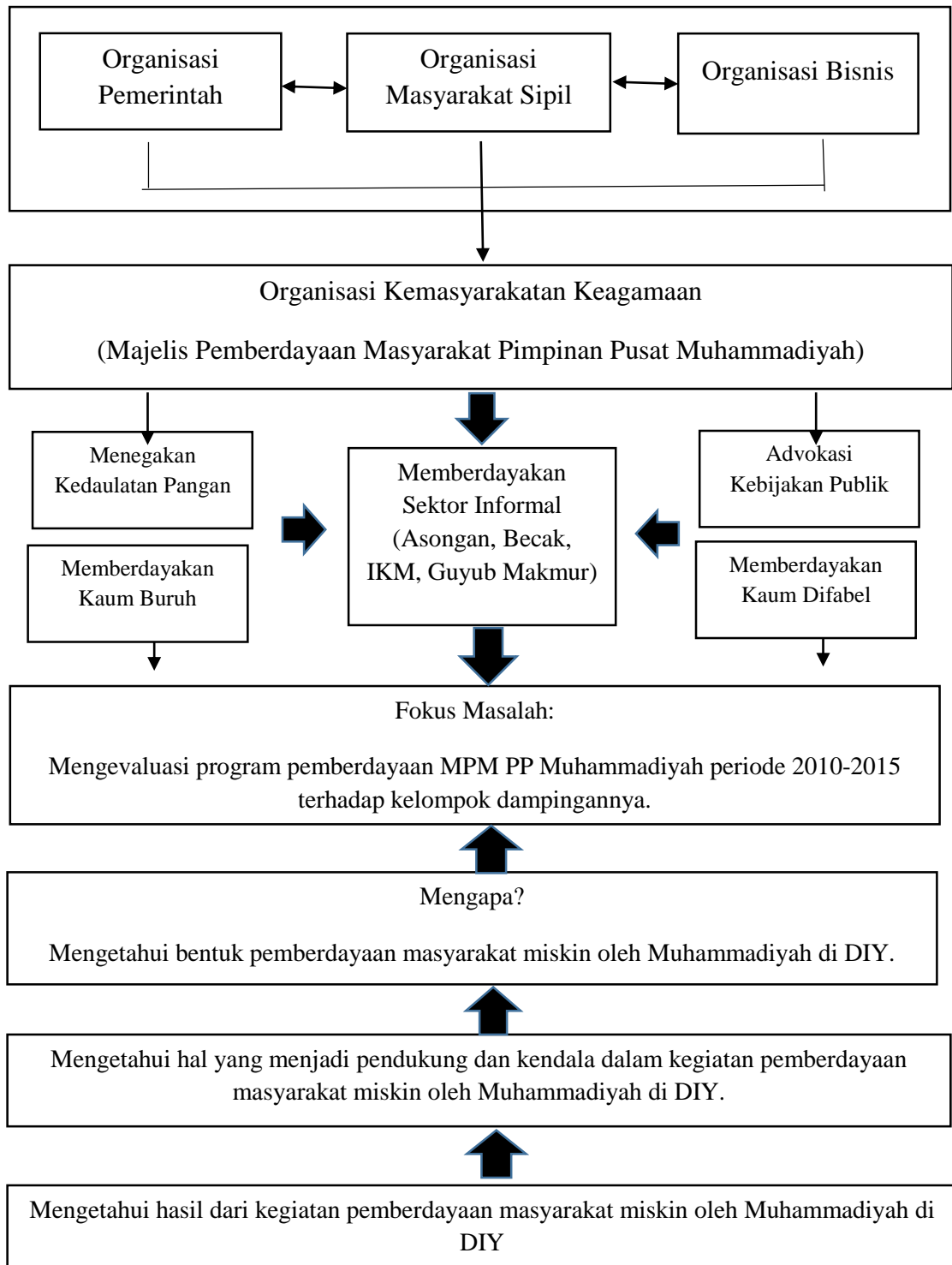


### **C. Model Penelitian**

Permasalahan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi merupakan perpaduan ketiga *stakeholder* yaitu organisasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi bisnis. Organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) adalah salah satu bagian dari masyarakat sipil yang juga memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan. Ormas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah).

Ada berbagai macam sektor di MPM PP Muhammadiyah akan tetapi penelitian ini akan lebih fokus pada pemberdayaan di sektor informal yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun sektor informal terdiri dari kelompok Becak, komunitas Asongan, Industri Mikro Kecil (IKM) dan Guyub Makmur.

Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi program pemberdayaan MPM PP Muhammadiyah periode 2010-2015 terhadap dampingannya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Muhammadiyah serta mengetahui hasil dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah di DIY terhadap dampingannya.



Sumber: Sutisna, 2013 (modifikasi)

**GAMBAR 2.2.**  
Model Penelitian